

BIDANG INSTRUMEN DAN INFORMASI

Indonesia's FOLU Net Sink 2030

INDONESIA's
FOLU
NET SINK
2030

KETUA BIDANG V IFNET 2030
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
27 Juni 2022



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

OUTLINE



TUGAS BIDANG V



STRUKTUR ORGANSASI BIDANG V



RENCANA KERJA POKJA I - III

Tugas Bidang V

Bidang I

- Manual operasi PHL
- Koordinasi implementasi PHL
- Koordinasi monev
- implementasi PHL

Bidang II

- Manual operasi Peningkatan Cadangan Karbon
- Memantau implementasi Peningkatan Cadangan Karbon
- Evaluasi implementasi Peningkatan Cadangan Karbon

Bidang V

- **Informasi hasil kerja**
- **Penegakan hukum**
- **Menyiapkan standar**
- **Monitoring dan evaluasi**

Bidang III

- Manual operasi peningkatan konservasi kehati
- Memantau implementasi peningkatan konservasi kehati
- Evaluasi implementasi peningkatan konservasi kehati

Bidang IV

- Manual operasi Pengelolaan Ekosistem Gambut
- Memantau implementasi Pengelolaan Ekosistem Gambut
- Evaluasi implementasi Pengelolaan Ekosistem Gambut

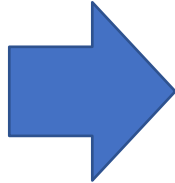
STRUKTUR ORGANISASI



RUANG LINGKUP FOLU Net Sink 2030

DUKUNGAN INFORMASI DAN INSTRUMEN:

1. SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2. LAW ENFORCEMENT
3. EVALUASI KEBIJAKAN RRE DAN STANDARISASI



Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral



Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut dan Mangrove



Pengurangan Laju Degradasi Hutan Lahan Mineral



Pengurangan Laju Degradasi Hutan Lahan Gambut dan Mangrove



Pembangunan Hutan Tanaman



Pengelolaan Hutan Lestari



Rehabilitasi Dengan Rotasi



Rehabilitasi Non Rotasi



Restorasi Gambut dan Perbaikan Tata Air Gambut



Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang



Konservasi Keanekaragaman Hayati



Perhutanan Sosial



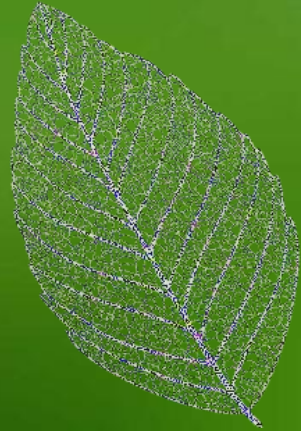
Introduksi Replikasi Ekosistem, Ruang Terbuka Hijau dan Ekoriparian



Pengembangan dan Konsolidasi Hutan Adat



Pengawasan dan *law enforcement* dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan



Sosialisasi Dan Komunikasi

RENCANA KEGIATAN POKJA I

Pengelolaan Hubungan Media

- Siaran pers
- *Media briefing*
- Sosialisasi kepada media massa

Pengelolaan Media Sosial

- Penayangan materi paparan melalui YouTube KLHK
- Penayangan cuplikan video dan/atau infografis melalui media sosial KLHK
- *Podcast* Pojok Iklim

Forum Tatap Muka/Daring

- Sosialisasi di enam ekoregion
- Sosialisasi Pemda dan K/L
- Sosialisasi mitra KLHK, *Youth*, PUG KLHK dan PUG Sub-Pokja

Pencetakan dan Penggandaan Bahan

- *Manual book*
- *Factbook* dan *policy brief*
- Media publikasi luar ruang

KELOMPOK SASARAN & KONTEN KOMUNIKASI

KELOMPOK SASARAN

- Internal Kementerian LHK
- Kementerian/Lembaga
- Pemerintah Daerah
- Anggota Komisi IV DPR RI
- Anggota Komite II DPD RI
- Akademisi
- Peneliti
- LSM
- Komunitas LHK
- Asosiasi Bisnis LHK
- Media
- Lembaga Asing
- Perwakilan Negara Asing
- Masyarakat Umum

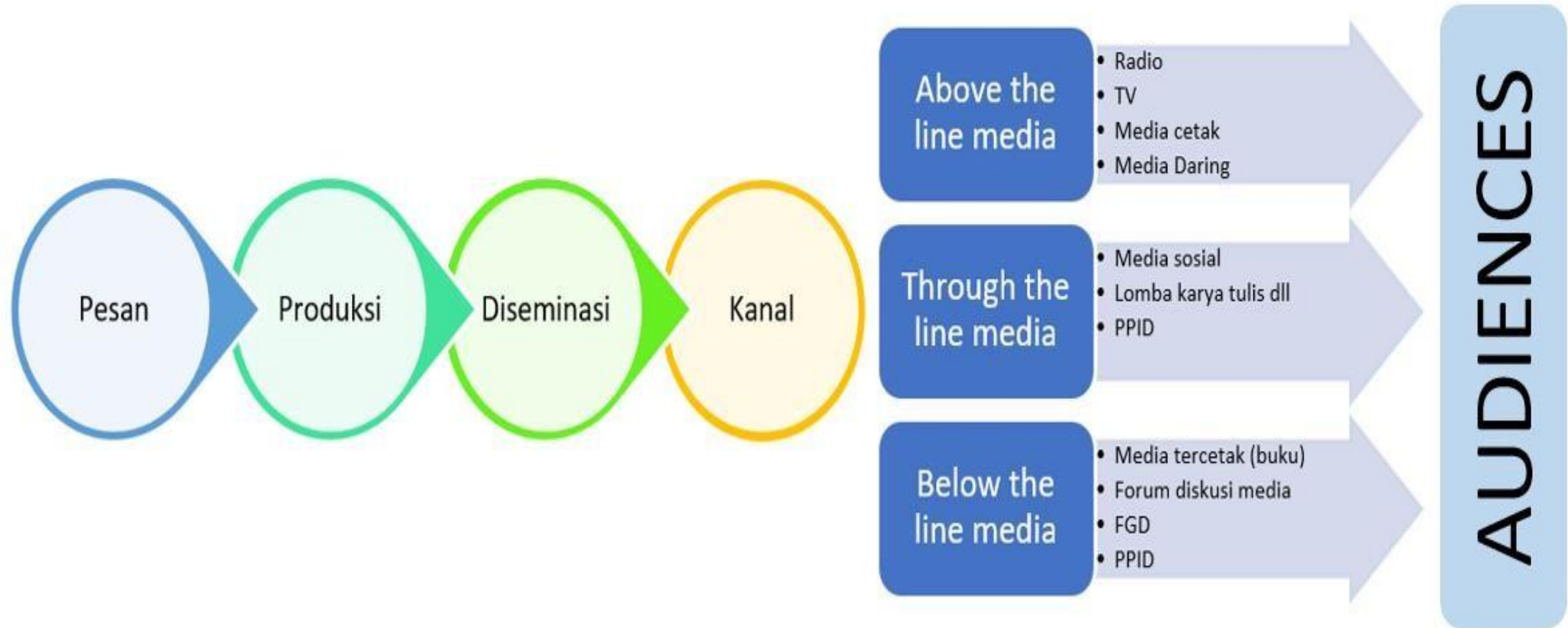
KONTEN KOMUNIKASI

- Pengelolaan Hutan Lestari
- Peningkatan Cadangan Karbon
- Konservasi
- Pengelolaan Ekosistem Gambut
- Informasi dan Instrumen

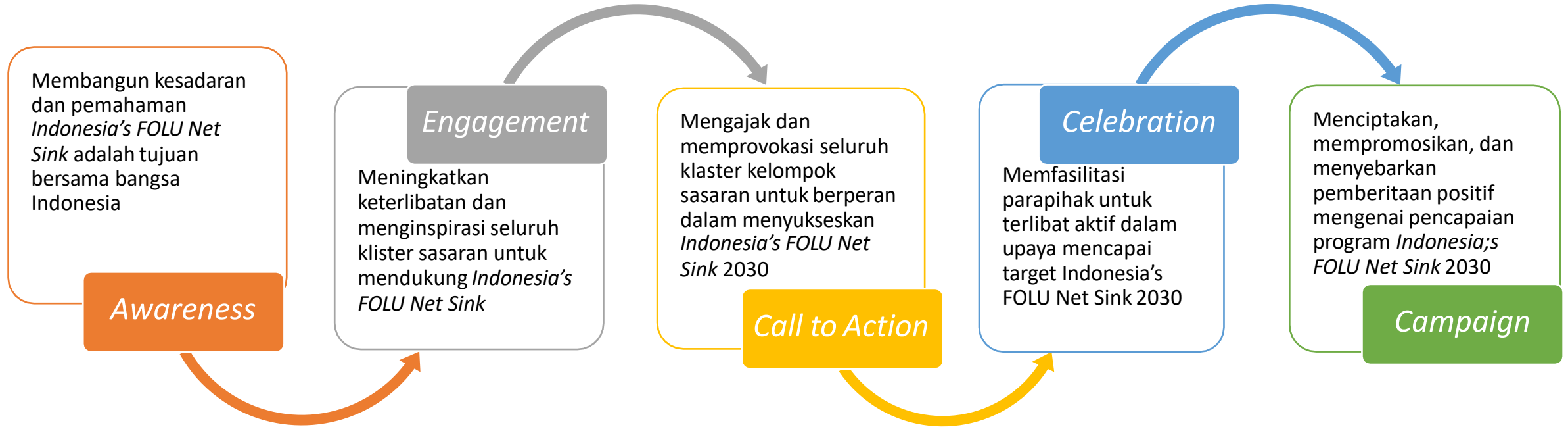
STRATEGI MEDIA



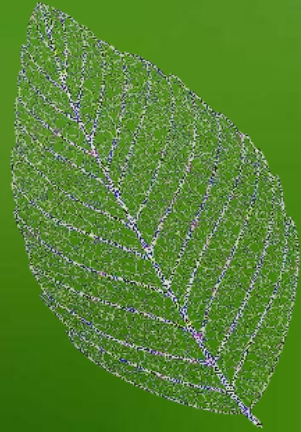
Alur Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi



IMPLEMENTASI KOMUNIKASI 2022 – 2030



Konten Produk Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi pesan <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 ke dalam materi sambutan, arahan, pidato, dan bahan rapat Menteri, Wamen, dan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. - Konten video/foto/ visual - Konten media sosial - Siaran pers - Media briefing 	<ul style="list-style-type: none"> - Online goes to offline method - Forum tatap muka di 6 (enam) region - Podcast - Kunjungan jurnalistik - Kunjungan kerja - Kuliah umum - Kerja sama dengan Media Group 	<p>Program-program kampanye yang mengundang partisipasi para pihak, seperti misalnya penganugerahan Proper, Wanalestari, Kalpataru, Adipura, dll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konten video/foto/ visual - Konten media sosial - Advertorial - Siaran pers - Media briefing - Podcast <p>Terkait success story dan best practices upaya para pihak menuju <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konten video/foto/ visual - Konten media sosial - Advertorial - Siaran pers - Media briefing - Podcast - Talkshow <p>Terkait success story dan best practices upaya para pihak dalam menciptakan emisi bersih</p>
--------------------------	---	---	---	---	---



Law Enforcement

RENCANA KEGIATAN POKJA II



Pencegahan



Peningkatan ketaatan badan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup



Penanggulangan gangguan keamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan



Penegakan hukum pidana



Penyelesaian sengketa lingkungan hidup



Monitoring dan Evaluasi



Peningkatan peran paralegal

Strategi Law Enforcement

1

Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan

- Pencegahan Deforestasi dan Degradasi, Gangguan Pengamanan Hutan Hutan Alam dan Mangrove.
- Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi, Gangguan Pengamanan Hutan Hutan Alam dan Mangrove
- Penegakan Hukum yang tegas (yustisi) bagi Pelaku Perambahan, Illegal Logging, Pertambangan tanpa izin, Pembakaran Hutan dan Lahan, Perusakan Mangrove dan Ekosistem Gambut

2

Peningkatan Perlindungan Lingkungan Hidup

Pengawasan Penaatan Perizinan LHK

Fokus:

- pencegahan karhutla
- mitigasi deforestasi dan degradasi lahan mineral.
- pengelolaan ekosistem gambut.
- Pengawasan terhadap HTI dan Perkebunan yang memiliki HGU di lokasi dengan nilai IPL tinggi
- Penerapan Sanksi Administrasi
- Ganti Kerugian Lingkungan
- Penegakan Hukum Pidana

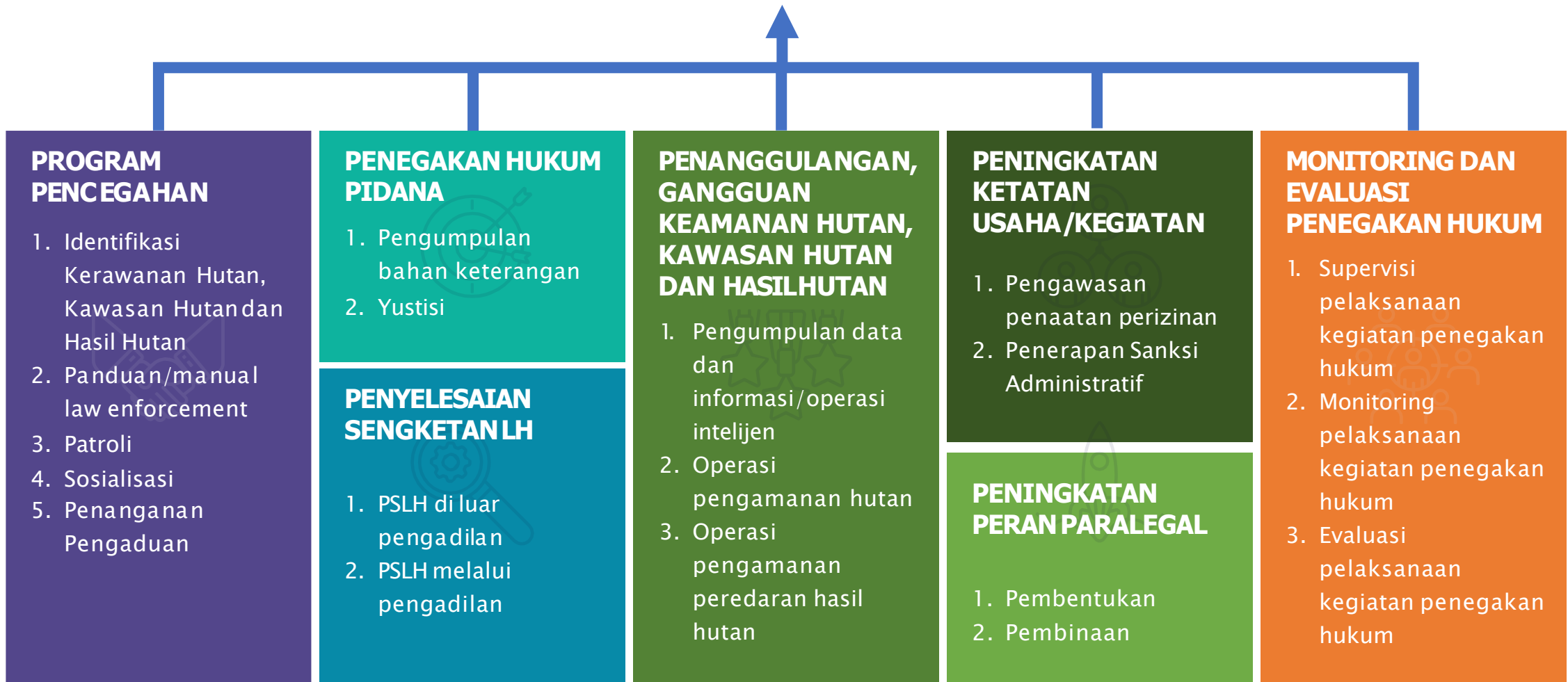
3

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum LHK

- Pembentukan paralegal
- Pembinaan paralegal

TARGET, PROGRAM DAN KEGIATAN *LAW ENFORCEMENT*

Hutan Alam, Hutan Tanaman, HGU, IUP, Kawasan Konservasi, PIAPS dengan Indeks BioGeofisik (IBGF) Tinggi-Sangat Tinggi (IPL 7,8,9)



LANGKAH KERJA KEGIATAN *LAW ENFORCEMENT*

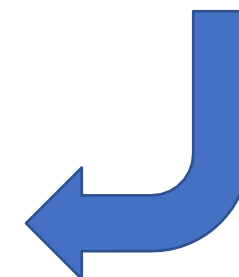
ISSUES OF CONCERN	AREA OF CONCERN	INSTRUMEN	SISTEM PENDUKUNG DAN SUMBERDAYA	KERJA-KERJA	TARGET
Deforestasi <ul style="list-style-type: none"> • Berizin • Illegal 	Forest Area	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan • Penanggulangan • Pengawasan • Penegakan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi, SOP, dan Panduan • Sistem dan Teknologi <i>Deteksi Dini</i> • Forensic dan Spatial Data • Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan Papan Peringatan • Operasi Perambahan, Illegal logging, TSL • Pengawasan Ketaatan izin HTI, HGU, IUP • Pidana, Perdata dan SA dan denda 	<ul style="list-style-type: none"> • Hutan Alam (HPH) • HTI, • HGU, • IUP, • KK • PIAPS Dengan dengan nilai IBGF 7,8,9
	Non Forest Area				
Forest Degradation <ul style="list-style-type: none"> • Berizin • Illegal 	Forest Area	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan • Penanggulangan • Pengawasan • Sanksi • Penegakan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi, SOP, dan Panduan • Sistem dan Teknologi <i>Deteksi Dini</i> • Forensic dan Spatial Data • Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan HTI, HGU • Sanksi Administrasi • Gugatan Perdata • Pidana 	<ul style="list-style-type: none"> • HTI dan HGU Dengan dengan nilai IBGF Tinggi – sangat Tinggi
	Non Forest Area				
Karhuta	Forest Area	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan • Pengawasan • Sanksi • Penegakan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi, SOP, dan Panduan • Sistem dan Teknologi <i>Deteksi Dini</i> • Forensic dan Spatial Data • Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan Papan Peringatan • Pengawasan HTI, HGU • Sanksi Adminitrasi • Operasi Pemulihan, • Pidana, • Perdata 	<ul style="list-style-type: none"> • HTI, HGU, KK Dengan dengan nilai IBGF Tinggi – sangat Tinggi
	Non Forest Area				
Perusakan Gambut <ul style="list-style-type: none"> • Berizin • Illegal 	Forest Area	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan • Penanggulangan • Pengawasan • Sanksi • Penegakan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi, SOP, dan Panduan • Sistem dan Teknologi <i>Deteksi Dini</i> • Forensic dan Spatial Data • Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi, SOP, dan Panduan • Sistem dan Teknologi <i>Deteksi Dini</i> • Forensic dan Spatial Data • Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • KK, APL, PIAPS Dengan dengan nilai IBGF Tinggi – sangat Tinggi
	Non Forest Area				
Perusakan Mangrove <ul style="list-style-type: none"> • Berizin • Illegal 	Forest Area	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan • Penanggulangan • Pengawasan • Sanksi • Penegakan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi, SOP, dan Panduan • Sistem dan Teknologi <i>Deteksi Dini</i> • Forensic dan Spatial Data • Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi, SOP, dan Panduan • Sistem dan Teknologi <i>Deteksi Dini</i> • Forensic dan Spatial Data • Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • KK, APL, PIAPS Dengan dengan nilai IBGF Tinggi – sangat Tinggi
	Non Forest Area				

Tabel 15. Luas area pelaksanaan program aksi mitigasi menurut pemangku kawasan pada IPL 7, 8 dan 9 (2021-2024) dalam hektar

Pemangku Kawasan	Jenis Pengelolaan	Deforestasi		Degradasi Konsesi ³	PBPH-HT ³	PHL		Peningkatan Cadangan Karbon		Pengelolaan Gambut		Konservasi Tinggi ³
		Mineral	Gambut			ENR ³	RIL-C ³	Rotasi	Non-Rotasi	Tata Air ³	Restorasi	
DITJEN PHL	HP-Non Konsesi	245.657	183.704			1.806		88.457	215.842		13	11.095.028
	HPK-HP	145.372	60.659			1.881		304.044	123.972		1.486	840.150
	KPHP-HTI	199.936	199.659	402.222	1.346.427	1.201.355	192.367	2.106.325	971.734	718.021	506.024	1.443.708
	KPHP-HPH	53.778	77.641	5.444.456		5.881.374	4.380.996	1.519.486	320.782		129.751	5.460.254
	KPHP-RE	147.384	9.478	84.277		6.257		23.987	43.052		26.852	360.930
DITJEN PDASRH	HL-Non PIAPS	46.056	22.670			30			92.711		-	14.128.824
DITJEN KSDAE	KONSERVASI	177.732	131.885			444			638.548		9.351	
DITJEN PSKL	KPHL-PIAPS	11.943	12.577			100			29.000		43.593	1.459.031
	KPHP-PIAPS	126.803	89.867		116.041	2.531		38.869	168.036		200.624	1.750.410
DITJEN PPKL ⁴	GAMBUT										40.749	
BRGM ⁵	BRGM										1.070.689	
PEMDA	PEMDA-Non HGU	552.267	117.857					1.230.100	85.070			1.350.742
	PEMDA-HGU	116.701	56.465					221.820	33.488	956.682	116.940	440.472
TOTAL		1.823.630	962.461	5.930.955	1.462.467	7.095.778	4.573.363	5.533.087	2.722.236	1.674.703	2.146.059	38.329.548
TARGET NDC 2024¹		5.056.451	55.617	N.A	9.307.332	1.589.494		2.422.563	1.453.538	863.914	977.034	
TARGET NDC 2030¹		7.195.913	75.321	N.A	11.227.332	3.105.817		3.460.804	2.076.482	863.914	1.395.763	
TARGET LTS 2024²		2.954.287	187.854	1.705.000	9.307.332	1.413.203		1.951.493	1.756.344	785.439	1.996.762	
TARGET LTS 2030²		3.973.232	252.645	2.282.500	11.227.332	2.207.061		2.787.847	2.509.062	946.050	2.724.866	

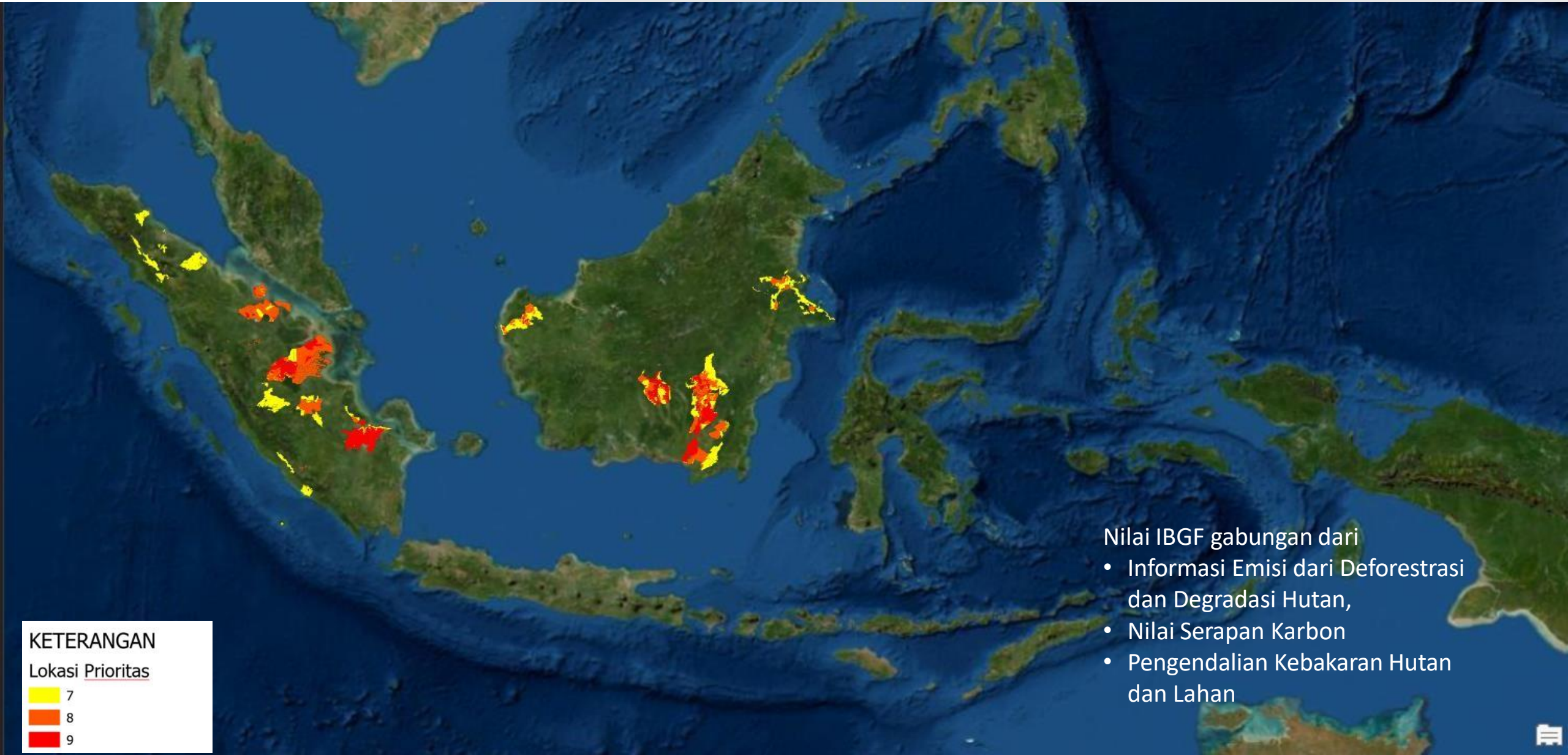
Catatan: Angka yang tercantum dalam tabel dalam satuan hektar¹ Dihitung berdasarkan target NDC dan ² LTS-LCCP (KLHK, 2021), nilai menunjukkan target kumulatif sejak 2011 (kecuali deforestasi dan degradasi hutan, kumulatif sejak 2013) dan belum dikoreksi dengan nilai aktual historis 2013-2020, luas target kegiatan peningkatan cadangan karbon dan restorasi gambut belum dikalikan dengan survival rate; ³ Area untuk pencegahan degradasi hutan, pembangunan HT, pelaksanaan pengelolaan hutan lestari (PHL) dan pengelolaan tata air gambut yang ada di area konsesi (PBPH-HT dan HGU) adalah di semua IPL 1-9; ⁴ Berdasarkan Perpres 92 Tahun 2020 dan Permen LHK No. 15 Tahun 2021, pengelolaan HL dilaksanakan oleh Ditjen PHL ⁵ PPKL sebagai pemangku pelaksanaan kegiatan restorasi di luar kawasan hutan atau Area Penggunaan Lain (APL) yang bukan HGU; ⁶ BRGM sebagai pemangku pelaksanaan kegiatan restorasi gambut di 7 Provinsi (Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua) yang berada di luar konsesi di seluruh fungsi Kawasan hutan, sedangkan di luar ke 7 provinsi tetap dalam kewenangan masing-masing pemangku kawasan.

DUKUNGAN LAW ENFORCEMENT DALAM AKSI MITIGASI



PRIORITAS LOKASI KERJA LAW ENFORCEMENT : HPH, HTI, KK, HGU, PIAPS

(Sesuai dengan IBGF* (Indeks BioGeoFisik) dengan Nilai IPL 7 (tinggi),8 (sangat tinggi), 9 (ekstrim tinggi)



KETERANGAN

Lokasi Prioritas



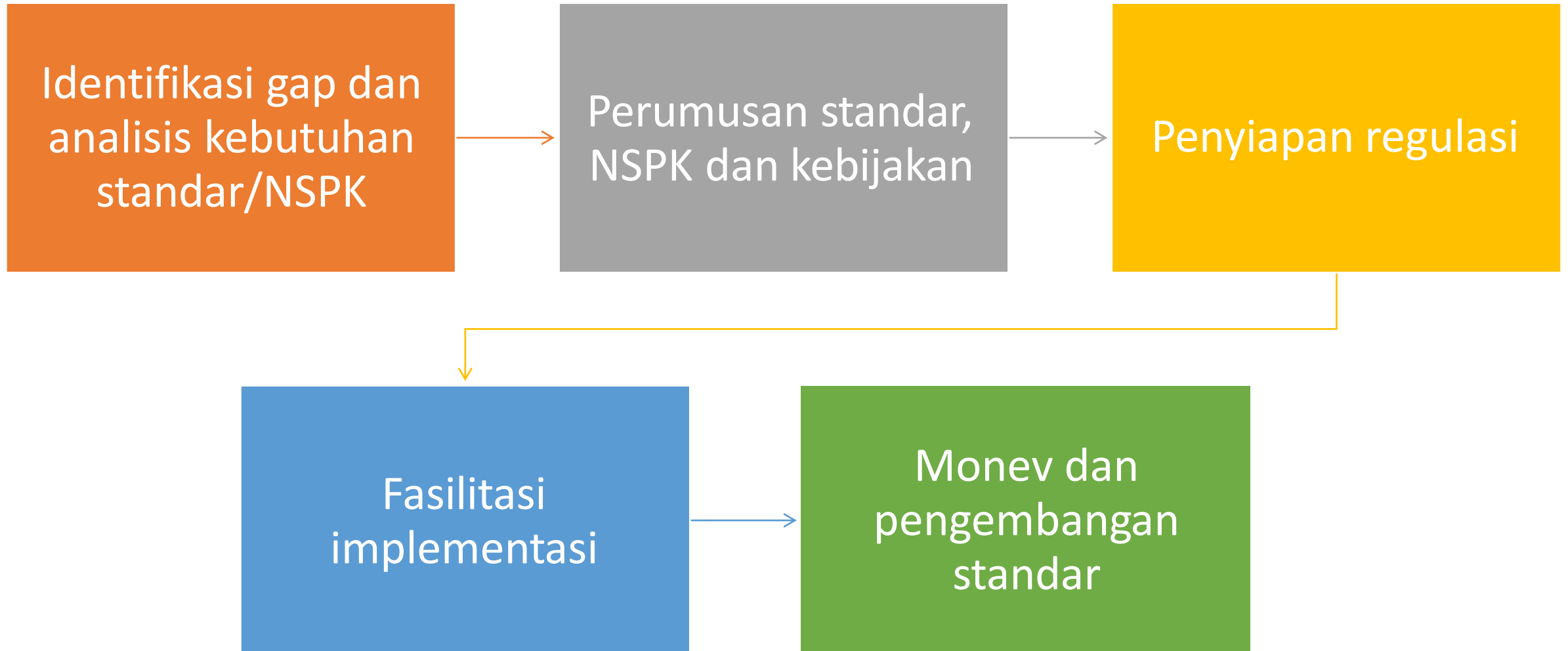
Nilai IBGF gabungan dari

- Informasi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan,
- Nilai Serapan Karbon
- Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Evaluasi, Kebijakan RRE, dan Standardisasi



RENCANA KEGIATAN POKJA III



STRATEGI EVALUASI, KEBIJAKAN RRE, DAN STANDARDISASI

1

Baseline Analisis



Identifikasi standard/pedoman/kebijakan yang telah ada dan mendukung Bidang 1-4 dalam pencapaian Indonesia's FOLU Net Sink 2030

Mengetahui gap standard/pedoman/kebijakan yang diperlukan untuk mendukung Bidang 1-4 dalam pencapaian Indonesia's FOLU Net Sink 2030

2

Pembangunan koordinasi dengan Bidang 1-4 untuk penguatan dukungan kebijakan



Monitoring dan Evaluasi Kebijakan kegiatan Bidang 1-4

Telaah kesesuaian kebijakan kegiatan Bidang 1-4

3

Penyediaan *Enabling Condition* Bidang 1 - 4



Penyusunan formulasi arah kebijakan bersama Bidang 1-4 (Identifikasi gap dan analisis kebutuhan kebijakan dan standar)

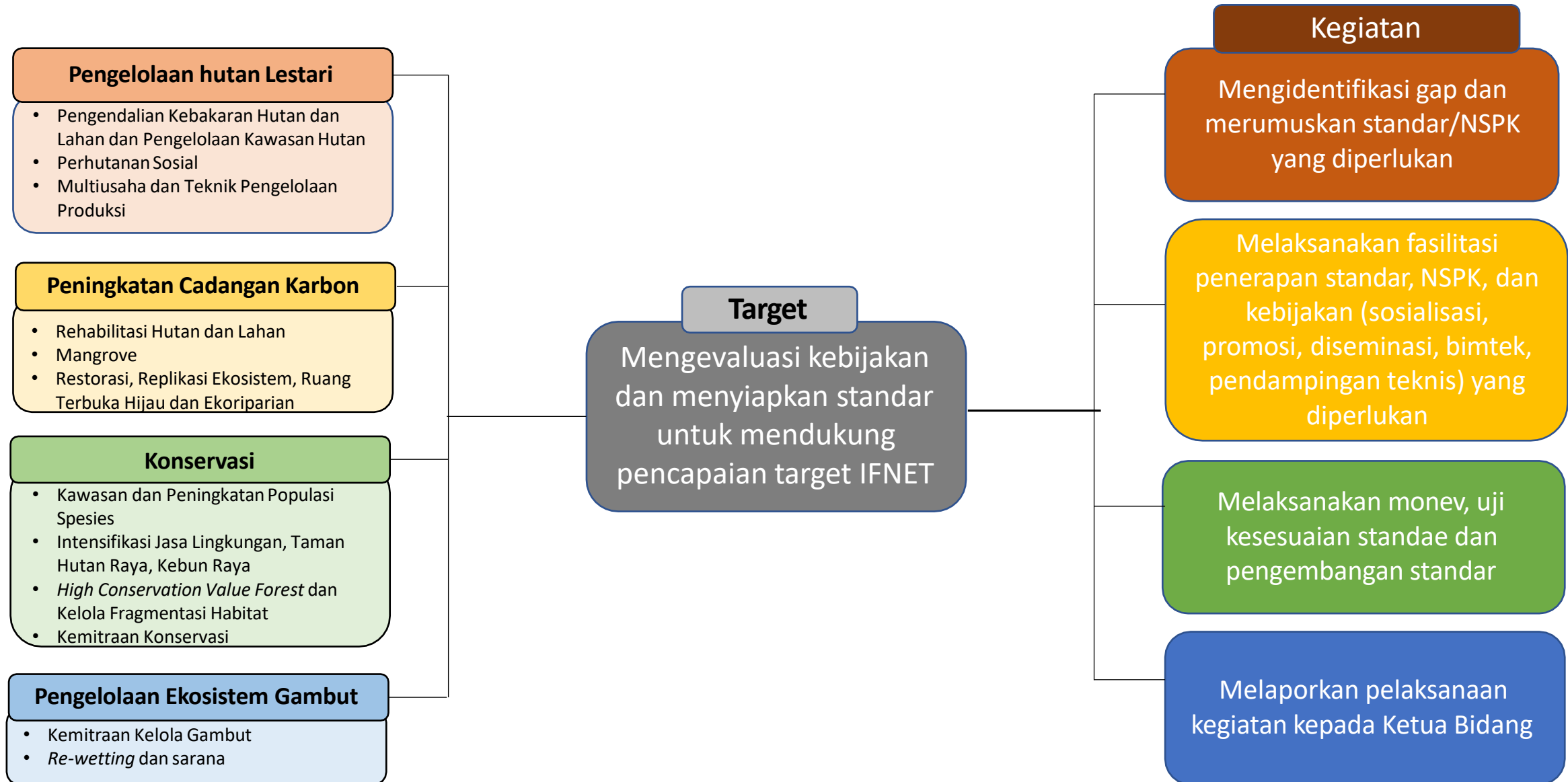
Penyusunan dan Penetapan Standar/ NSPK

Penyiapan Kebijakan

Fasilitasi Implementasi Standar (Sosialisasi, Bimtek, Promosi, Pendampingan)

Monev Penerapan dan Pengembangan Standar

TARGET DAN KEGIATAN EVALUASI, KEBIJAKAN RRE, DAN STANDARDISASI

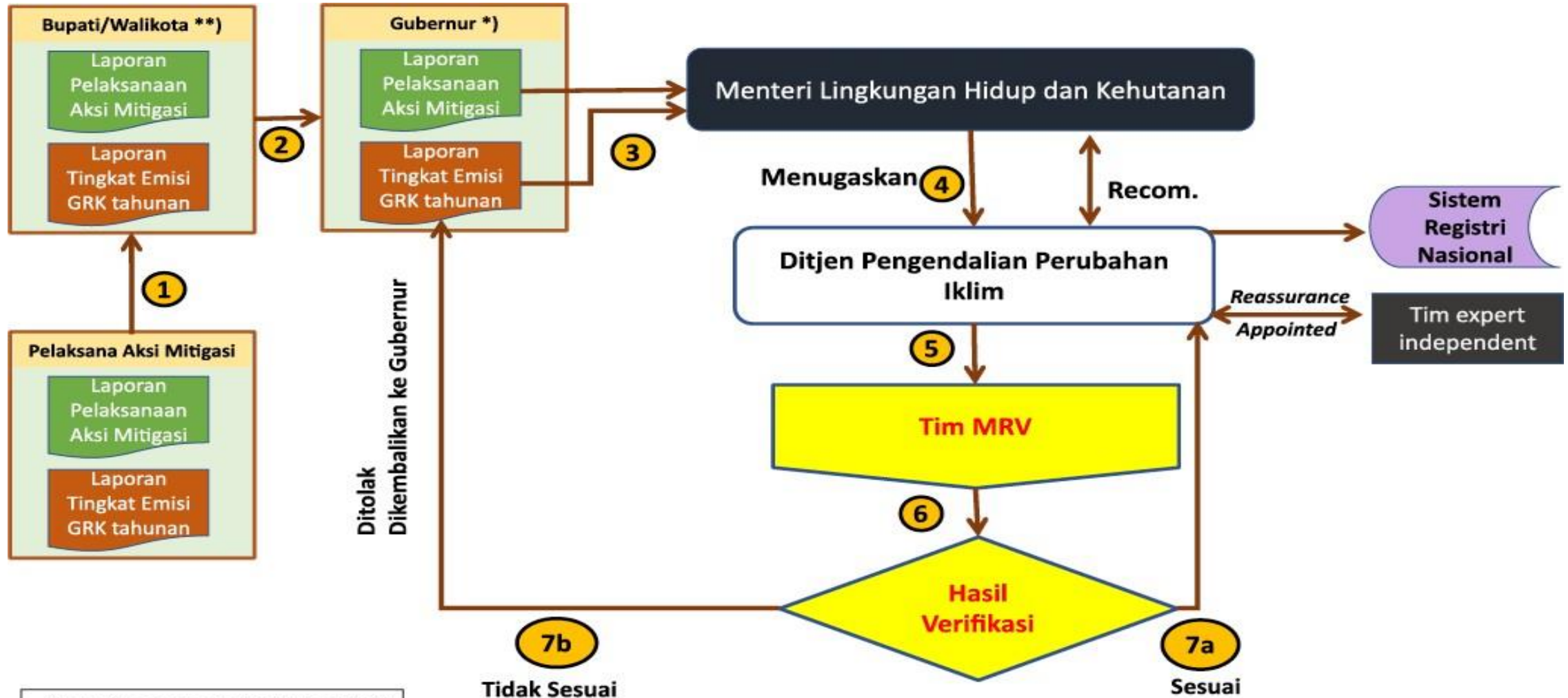


DUKUNGAN PENERAPAN PERPRES 98/2021 PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON

BIDANG PENGURANGAN EMISI GRK

TARGET	KEGIATAN	EXISTING STANDAR	PERATURAN PENDUKUNG
<p>Mengevaluasi kebijakan dan menyiapkan standar untuk mendukung pengurangan emisi GRK dalam pencapaian target IFNET</p>	<p>a. Mengidentifikasi gap dan merumuskan standar/NSPK terkait pengurangan emisi GRK; dan SRN</p> <p>b. Penyiapan regulasi</p> <p>c. Fasilitasi implementasi standar (sosialisasi, bimtek, promosi, pendampingan);</p> <p>d. Melaksanakan monev dan pengembangan standar untuk mendukung pengurangan emisi GRK; dan</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.</p>	<p>SNI Metodologi Aksi Iklim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SNI ISO 14080:2018 Manajemen gas rumah kaca dan kegiatan terkait - Kerangka kerja dan prinsip untuk metodologi aksi iklim. <p>SNI Panduan GHG Level Proyek & Organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SNI ISO 14064-1:2018 Gas rumah kaca – Bagian 1: Spesifikasi dengan panduan pada tingkat organisasi untuk kuantifikasi dan pelaporan emisi dan serapan gas rumah kaca; 2. SNI ISO 14064-2:2019 Gas rumah kaca – Bagian 2: Spesifikasi dengan panduan pada tingkat proyek untuk kuantifikasi, pemantauan, dan pelaporan pengurangan emisi atau peningkatan serapan gas rumah kaca; 3. SNI ISO 14064-3:2019 Gas rumah kaca - Bagian 3 : Spesifikasi dengan panduan untuk validasi dan verifikasi dari pernyataan gas rumah kaca. <p>SNI Persyaratan Kompetensi bagi Lembaga Validasi dan Verifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SNI ISO/IEC 14065: 2020 Gas rumah kaca – Persyaratan bagi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca untuk digunakan dalam akreditasi atau bentuk pengakuan lainnya; 2. SNI ISO/IEC 17029:2019 Penilaian kesesuaian – Prinsip dan persyaratan umum untuk lembaga validasi dan verifikasi. <p>Skema pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skema Akreditasi Lembaga Validasi/Verifikasi GRK oleh KLHK dan KAN; 2. Skema Ekolabel (Label Lingkungan) Indonesia oleh KLHK dan KAN (PermenLHK No. 2 tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel); 3. Skema Pengadaan Barang/Jasa Ramah Lingkungan di Pihak Pemerintah (PP 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PermenLHK No. 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PerMen LHK No. P.70/017 ttg Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks 2. Perpres. 98/2021, Draft RPermen NEK dan Rpermen NDC

Mekanisme Pengumpulan Data, MRV Dan SRN



*) cq. Dinas yang membidanagi LHK
**) cq. Dinas yang membidangi LH



TERIMA KASIH